

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan bahwa adanya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup rakyat.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia dan merupakan milik pemerintah. Dalam memasarkan produknya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk mendirikan kantor cabang dan kantor unit di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah kantor unit wayhalim. Kantor BRI unit wayhalim ini memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk layanan simpanan dan layanan pinjaman. Kemampuan Kantor BRI unit Wayhalim dalam pengelolaan kredit yang mereka salurkan mempunyai pengaruh besar terhadap stabilitas dan keberhasilan bank BRI secara keseluruhan. Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ini demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan (PPKPB) bagi Bank Umum. Menurut Taswan (2019) kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakandengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dalam rangka mengamankan dana masyarakat dan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan usaha bank, dalam pelaksanaan pemberian kredit bank diharuskan berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat yang dituangkan melalui suatu kebijaksanaan perkreditan bank dalam bentuk tertulis, dikarenakan kredit memiliki resiko kredit macet yang cukup besar bagi kelangsungan suatu perusahaan. Untung (2004) menyebutkan bahwa meskipun perbankan merupakan sektor yang strictly well regulated, tetapi kredit macet masih dapat terjadi diantaranya dapat disebabkan :

1. Kesalahan appraisal
2. Membiayai proyek dari pemilik/ terafiliasi
3. Membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu
4. Dampak makro ekonomi
5. Kenakalan nasaba

1.2 Ruang Lingkup Kerja

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu diadakan pembatasan masalah dimaksudkan untuk memperjelas permasalahan yang diteliti terfokus dan mendalam mengingat luasnya permasalahan yang ada. Penelitian ini memfokuskan pada Langkah Langkah atau hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memberikan Kredit terhadap nasabah serta Langkah apa yang dapat diambil dalam menghadapi Persoalan Kredit Macet di Perbankan.

1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian

1. Manfaat Penelitian

1 Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisa hal hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit pada sektor perbankan.

2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan tata kerja dan mekanisme administrasi yaitu tentang pemberian kredit dan penanganan kredit macet.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui hal hal apa saja yang perlu diperhatikandalam pemberiankredit oleh pihak Bank.
- 2 Untuk mengetahui aspek aspek apa saja yang dapat menyebabkan Kreditmacet.
- 3 Untuk mengetahui hal hal apa saja yang dapat dilakukan olehpihak bank bilaterjadi kredit macet.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Waktu Pelaksanaan

Saya melaksanakan kegiatan kerja praktek (KP) sesuai dengan jadwal kerjapegawai lainnya yakni di hari senin hingga jumat, dan dimulaipukul 07:15 hingga pukul 16: 30 WIB.

NO	HARI	JAM MASUK	JAM PULANG
1	SENIN	07:30	16:45
2	SELASA	07:30	16:45
3	RABU	07:30	16:45
4	KAMIS	07:30	16:45
5	JUM'AT	07:30	16:45

Tabel 1. jam kerja Kantor BRI unit Wayhalim

2. Tempat Pelaksanaan

Kantor BRI Unit Wayhalim, Jalan Kimaja No 13 blok BB kecamatan wayhalim, kota Bandar Lampung. Lampung. Saya melaksanakan kegiatan kerja praktek (KP) selama 30 Hari kerja terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2023 sampaidengan 31 Agustus 2023.

1.5 Sistematika Penulisan

Isi Laporan Tentang “OPTIMALISASI PENINGKATAN KUALITAS KREDIT DALAM RANGKA MENGATASI KREDIT BERMASALAH DI PERBANKAN”. Disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Ruang Lingkup

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.4 Waktu dan tempat pelaksanaan

1.4.1 Waktu Pelaksanaan

1.4.2 Tempat Pelaksanaan

1.5 Sistematika Penulisan

Bab 2 Gambaran Umum Instansi

2.1 Sejarah Perusahaan

2.2 Visi perusahaan

2.3 Bidang Usaha/Kegiatan Utama Perusahaan

2.4 Lokasi Perusahaan

2.5 Struktur Perusahaan

Bab 3 Permasalahan Instansi

3.1 Analisa Permasalahan yang dihadapi Perusahaan

3.1.1 Temuan Masalah

3.1.2 Perumusan Masalah

3.1.3 Kerangka Pemecah Masalah

3.2 Landasan Teori

3.2.1 Doctrine of Asset Shiftability

3.3 Metode yang digunakan

3.4 Rancangan Program

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.2 Pembahasan

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran